

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DI SEKOLAH/MADRASAH

**Anip Dwi Saputro**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
**anipdwisaputro@gmail.com**

## ***Abstract***

*School/Madrasah is the system of education in this country, school/Madrasah has a system of education, such as basic education, objectives, curriculum, methods, patterns student teacher relationship, and so forth. Such a system can be created using an integrated quality management through concepts, strategies and applications. That's all it took the setup process management to achieve educational goals effectively and efisien. Sistem effective and efficient could be in the form of the integrated quality management (MMT). Implementation of Integrated Quality Management in Schools/Madrasah wear integrated quality management (MMT). From the description it can be concluded that the management could dikatakan as a process in order to achieve the goal by working together through people and other organizational resources. Management becomes a reference system for mengordinir and control all of the potential that exists within a particular organization. The aim is to arrange everything so well done, accurate and complete. With reference to the quality standards of Government Regulation No. 19 Year 2005 on National Education Standards, which includes the provision of the eight standards, namely: 1) Standard Competency, 2) Content Standards, 3) Processing Standards, 4) Standards of Education and the Workforce, 5) Infrastructure Standards, 6) Standard Management, 7) Financing Standards Education, 8) Education Assessment Standards. Implementation of Integrated Quality Management Schools/Madrasah there are several strategies that can be implemented by the school/madrasah among others, include a self-evaluation to analyze the strengths and weaknesses of the school/madrasah. Based on the evaluation of school madrasah together parents and society determines the vision and mission of the school/madrasah in improving the quality of education or formulate the expected quality and continued with planning school programs/madrasah including financing, with reference to priorities and national policies in accordance with the conditions of the school/madrasah and resources available.*

***Keywords: quality management and the school***

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat tempat mereka hidup. Menurut *webster's new world dictionary* (1962), pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya (Sagala, 2007: 1). Proses pendidikan pada hakekatnya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam keperluan untuk hidup di dunia. Selain itu peserta didik juga diajarkan nilai-nilai akhlak, membina hati dan ruhani sehingga melahirkan generasi penerus (*out put*) yang memiliki kepribadian utuh (*integrated personality*) sehingga dapat memakmurkan dan memuliakan kehidupan material dan spiritual, keluarga dan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai.

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi (UUD No 9 Tahun 2009, Amandemen UUD 1945).

Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara, 2004: 20).

Lembaga pendidikan di ciptakan untuk mengantarkan peserta didik dalam meningkatkan perilaku yang positif, salah satu usaha yang dilakukan dengan manajemen pengelolaan pendidikan dengan baik, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkan yang transparan. Dengan demikian, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengantarkan peserta didik mencapai manusia yang seutuhnya.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan; (8) Standar Penilaian Pendidikan. (Depdiknas, UU Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) Penetapan

standar-standar di atas bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Sulistiyorini, 2009:22).

Dalam pengelolaan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh kesungguhan dalam peningkatan mutu, berjangka panjang (human investment) dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Komitmen tersebut harus didukung oleh dedikasi yang tinggi terhadap mutu melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat yang dikenal dengan istilah MMT (Manajemen Mutu Terpadu).

Manajemen Mutu Terpadu Sekolah merupakan salah satu di antara ketiga pilar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Ada dua hal yang menjadi penekanan utama dalam pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Sekolah yaitu prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas*. *Transparansi* yang dimaksudkan disini adalah adanya kemudahan akses bagi semua *stake holder* dan publik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah mulai dari Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan laporan pelaksanaannya, informasi tentang perkembangan kemajuan belajar peserta didik dan sebagainya. Sedangkan *akuntabilitas* dimaksudkan bahwa semua rencana kerja dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua *stakeholder*.

Dalam pendidikan di Indonesia pemerintah sudah membuat standar mutu pendidikan dalam permendiknas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan.

Pada dasarnya istilah antara manajemen pendidikan dan juga manajemen sekolah memiliki maksud dan pengertian yang sama yaitu suatu usaha yang dilakukan secara bersama dalam suatu kelompok manusia supaya lebih efisien dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sementara tujuan daripada manajemen sekolah itu sendiri memang tidak bisa lepas dari tujuan sekolah sebagai sebuah organisasi. Manajemen yang baik yaitu apabila di dalamnya ada kegiatan pengelolaan seperti kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dengan status dan memiliki kewenangan sebagai manajer. Namun untuk tujuan lebih jelasnya yaitu membuat efektivitas produksi di setiap jenjang pendidikan,

dengan begitu para lulusan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. (<http://www.informasi-pendidikan.com/2014/09/manajemen-sekolah.html>)

Madrasah merupakan lembaga/organisasi yang kompleks dan unik. Kompleks, karena dalam operasionalnya madrasah dibangun oleh berbagai unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan saling menentukan. Unik, karena madrasah merupakan organisasi yang khas, menyelenggarakan proses perubahan perilaku dan proses pembudayaan manusia, yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun. Kaitannya dengan pengelolaan madrasah, bahwa bagaimana madrasah mampu melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. (Syukur, 2006: 20).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke 11 atau 12 M, yaitu sejak dikenal adanya madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam Al-Mulk, Pendirian madrasah ini telah memperkaya khasanah lembaga pendidikan dilingkungan masyarakat Islam, karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan tradisional yang diselenggarakan di masjid-masjid dan daral-khuttab. Dalam prinsipnya, madrasah merupakan pendidikan yang sama dengan pendidikan umum, tetapi lebih menekankan pendidikan Islam secara intensif dan mendalam. Perbedaan prinsip antara pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis yang seharusnya mewarnai sistem pendidikan tersebut.

Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Menurut pengamatan peneliti, Sekolah/Madrasah yang berhasil mengaplikasikan manajemen berbasis mutu sangat banyak sekali di pendidikan yang ada di Indonesia, diantaranya Sekolah/Madrasah yang sudah menjalankan Manajemen Mutu Terpadu memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol dilihat dari pengelolaan sekolah yang baik, penataan manajemen yang tertata, kuat dari sisi pengaruhnya, prestasi akademiknya yang unggul, memiliki kekuatan pendanaan yang stabil.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hakekat Dan Tujuan Manajemen**

Manajemen bisa dikatakan sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber

daya organisasi lainnya. Setiap jenis pengetahuan termasuk manajemen mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (*ontologi*), bagaimana (*epistemologi*) dan untuk apa (*aksiologi*) pengetahuan manajemen tersebut disusun. Ontologi ilmu terkait dengan epistemologi, dan epistemologi terkait dengan aksiologi dan seterusnya (Nanang Fattah, 2006: 11)

Teori manajemen mempunyai peran (*role*) atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan (*satisfaction*). Manajemen menjadi suatu acuan sistem untuk mengordinir dan mengendalikan semua potensi yang ada dalam suatu organisasi tertentu. Khususnya di sekolah sama halnya dengan suatu organisasi ada struktur yang jelas ada banyak potensi yang harus di kendalikan dikontrol dan disalurkan. Apa yang menjadi tujuan utama manajemen? Menurut *Shrode dan Voich* (1974) tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Mungkin saja tujuan ini tidak tunggal bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya. Manajemen dalam tujuannya adalah untuk mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. (Nanang Fattah, 2006: 22)

Menurut Stoner Manajemen secara umum yang dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu Manajemen sekolah menurut buku manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen diterapkan dalam bidang pemerintahan akan menjadi manajemen pemerintahan, dalam bidang pendidikan menjadi manajemen pendidikan, begitu seterusnya.

Manajemen sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi yang didapat, oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinan, harus menggunakan suatu sistem, artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang di dalamnya terdapat komponen-komponen terkait seperti guru-guru, staff TU, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, anak didik, dan lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan.

Pada hakekatnya istilah manajemen pendidikan dan manajemen sekolah mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Keduanya susah untuk dibedakan karena sering dipakai secara bergantian dalam pengertian

yang sama. Apa yang menjadi bidang manajemen pendidikan adalah juga merupakan bidang manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsi yang sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya.

## **2. Gerakan Mutu dan Standar Mutu Pendidikan Sesuai Dengan Permendiknas**

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri (Tiom Peters dan Nancy Austin, 1985: 34). Mutu bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu adalah ide yang sudah ada di hadapan kita. Mutu telah banyak dibicarakan orang. *The citizen's Charter, The parents's charter, Investors in people, The European Quality Award, British Standard BS5750, dan Internasional Standard ISO 9000*, merupakan bagian dari penghargaan dan standar mutu yang telah di perkenalkan beberapa tahun belakangan untuk mempromosikan mutu dan keunggulannya.

Organisasi-organisasi terbaik, baik milik pemerintah ataupun swasta, memahami mutu dan mengetahui rahasianya. Menemukan sumber mutu adalah sebuah petualangan yang penting. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan.

Sekolah memiliki "teamwork" yang kompak, cerdas dan dinamis. Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut oleh sekolah yang menerapkan peningkatan mutu, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat Sekolah yang menerapkan peningkatan mutu, memiliki karakteristik bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa

tanggung jawab; dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya.

Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen Keterbukaan/transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan peningkatan mutu. Keterbukaan/transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan Fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus. Perbaikan secara terus menerus harus merupakan kebiasaan warga sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan. Karena itu, system mutu yang baku sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. System mutu yang dimaksud harus mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang didalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Langkah Langkah Standar Mutu Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

b. Standar Isi Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi

tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

- c. Standar Proses Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan



Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

g. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

#### h. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
3. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
3. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Konsep Implementasi Standar Mutu.

Penetapan standar-standar diatas bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggungjawab kepada Mendiknas. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sekolah yang telah melakukan ujicoba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum mulai tahun ajaran 2006/2007. Fungsi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- b. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

- c. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

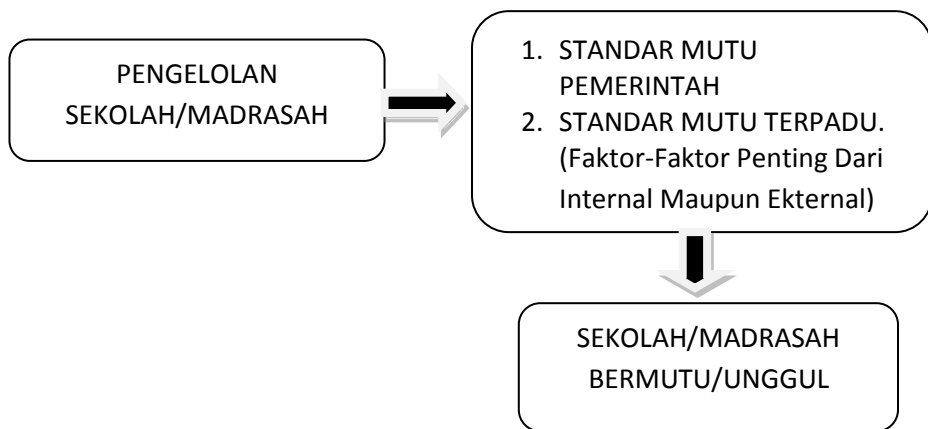
Faktor-faktor penting sebuah kesuksesan adalah indikator-indikator menyangkut hal-hal apa saja yang harus dicapai oleh sebuah institusi yang ingin memenuhi kepuasan pelanggan dan statemen misinya. Faktor-faktor tersebut adalah tahap lanjut proses strategi dan memberikan sebuah panduan tentang karakteristik inti mutu institusi. Indikator prestasi biasanya muncul dari pihak eksternal dan tidak selalu berhubungan secara spesifik dengan statemen misi atau keperluan pelanggan sebuah institusi. Sementara faktor-faktor penting kesuksesan sebuah institusi bisa menyertakan ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan atau reaksi terhadap kebutuhan komunitas serta indikator-indikator internal seperti jumlah peningkatan staf profesional atau kesuksesan operasi tim tujuan dari pembuatan daftar faktor-faktor penting kesuksesan tersebut adalah untuk berkonsentrasi pada kata penting dan kesuksesan. Faktor-faktor tersebut harus menyoroti apa yang harus dicapai jika institusi tersebut ingin menjalankan mutu terpadu. Faktor-faktor tersebut harus menyoroti apa yang harus dicapai jika institusi tersebut ingin menjalankan mutu terpadu sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor-faktor penting kesuksesan internal dan eksternal bisa mencangkup:

1. Internal
  - a. Sistem penerimaan yang mudah.
  - b. Bentuk pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pelajar.
  - c. Tim yang berfungsi secara tepat.
  - d. Nilai rata-rata ujian yang meningkat.
  - e. Berkembangnya nilai-nilai sosial, kultural dan etika dalam diri pelajar.
  - f. Meningkatkan strategi pembelajaran dan pengajaran.
  - g. Terlibatnya mayoritas staf dalam tim peningkatan.
  - h. Meningkatnya tingkat kemajuan, misalnya dalam hal pekerjaan dan pendidikan tinggi atau pendidikan lanjut.
2. Eksternal
  - a. Meningkatkan akses terhadap institusi.
  - b. Meningkatkan kepuasan pelanggan yang dibuktikan melalui survei.
  - c. Meningkatkan pasar.
  - d. Meningkatnya kepercayaan golongan minoritas atau kelompok yang belum maju.

- e. Reaksi yang semakin besar terhadap kebutuhan komunitas.
- f. Hubungan yang semakin kuat dengan dunia industri dan perdagangan.

Menurut Edward Sallis, bahwa membuat institusi akan mencapai kesuburan/keunggulan manakala telah berhasil menjalankan mutu terpadu, baik secara internal maupun eksternal, berdasarkan standar mutu pendidikan nasional. Kerangka teori bisa di gambarkan sebagai berikut: (Edward Sallis, 2012: 225).

Gambar 1  
Kerangka Teori



#### 4. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di Sekolah/Madrasah

Dalam pengimplementasian konsep management sekolah/madrasah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, sekolah/madrasah, keuangan dan fungsi setiap personil sekolah/madrasah didalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah/madrasah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta meyakinkan masyarakat tentang sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda didalam masyarakat sekolah/madrasah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah/madrasah melalui penerapan prinsip-prinsip

pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan didalam sekolah/madrasah itu sendiri maupun sekolah/madrasah lain.

Sekolah/Madrasah merupakan bentuk pendidikan formal di negara ini, yang berperan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya. Sudah seharusnya pendidikan formal di kelola dengan baik dan benar sesuai dengan standart mutu pendidikan yang sudah di buat oleh Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang didalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Delapan aspek mutu ini jika diwujudkan dengan implemntasi yang tepat sudah bisa dipastikan pendidikan akan memiliki mutu terpadu yang bagus.

Lembaga pendidikan hendaknya selalu mengkaji dan meneliti semua aspek yang ada di pendidikan, karena hal itu akan menjadikan evaluasi pendidikan yang ada di lembaga tersebut untuk menjadi loncatan bagaimana seharusnya lembaga pendidikan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Penerapan pendidikan tentunya tidak bisa lepas dari mutu, ketika pendidikan berjalan dengan mempertimbangkan standar mutu, banyak aspek yang harus dilakukan melalui *step by step* mutu harus di tingkatkan untuk menjamin pembentukan manusia yang sebenar-benarnya melalui pendidikan yang menerapkan Implementasi menejemen mutu terpadu.

Pada intinya sekolah/madrasah harus mengontrol semua sumberdaya termasuk sumberdaya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pengikatan mutu khususnya. Sementara, itu kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen ini, strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah/madrasah antara lain meliputi evaluasi diri untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah/madrasah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sekolah/madrasah bersama –sama orang tua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah/madrasah dalam peningkatan

mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana program sekolah/madrasah termasuk pembiayaan, dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah dan sumber daya yang tersedia.

### **C. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen bisa dikatakan sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Manajemen menjadi suatu acuan sistem untuk mengordinir dan mengendalikan semua potensi yang ada dalam suatu organisasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas.
2. Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Mutu adalah merupakan bentuk kualitas yang sangat tinggi harganya. Mutu bagi setiap institusi adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang didalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan Pendidikan, 8) Standar Penilaian Pendidikan.
3. Penetapan standar mutu berfungsi untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara structural bertanggungjawab kepada Mendiknas. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepadanya

dua yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).

5. Pelaksanaan Implementasi Manajemen Mutu Terpadu DiSekolah/Madrasah ini, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah/madrasah antara lain meliputi evaluasi diri untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah/madrasah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sekolah/madrasah bersama–sama orang tua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana program sekolah/madrasah termasuk pembiayaan, dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah dan sumber daya yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arcora, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Produk*, Jakarta: Renika Cipta, 1998
- Bugin, Burhan, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2004). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Hadi, Sutrisno, *MetodelogiResearahII*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1981.
- Lonfland, *Analyzing Social Setting, A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company,1984.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudyahardjo, Redja *Pengantar Pendidikan; sebuah studiawal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2006.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung; PT Remaja Rosda karya 2006.
- Sallis, Edward, *Total Quality Manajement In Education*,Jokjakarta: IRC iso D,2012
- Supriyanto, didik, dkk, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, Surabaya: Taruna Media Pustaka 2011.
- Syaiful, Sagala, *Manajemen Strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*, Bandung: Albeta; 2007.



Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: al-Qalam Press, 2006.

T. Hani Handoko, 1995, *Manajemen Sumber daya Manusia*, bpfe, Yogyakarta.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

**Referensi Internet:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Studi kasus](http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus)

[http://blujer.blogspot.com/2012/03/badan standar-nasional-pendidikanbsnp.html](http://blujer.blogspot.com/2012/03/badan_standar-nasional-pendidikanbsnp.html)

[http://id.wikisource.org/wiki/ Undang-](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005)

[Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_19 Tahun 2005.](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005)

<http://www.informasi-pendidikan.com/2014/09/manajemen-sekolah.html>